

TATA KELOLA LOKAL DAN COVID-19: PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN EKONOMI DI DESA PUJON KIDUL

Nyimas Nadya Izana^{1*}, Anik Susanti¹, La Ode Machdani Afala¹

¹Universitas Brawijaya, Indonesia

*e-mail: nyimasnadya@ub.ac.id

Abstrak

Ledakan pandemi COVID-19 telah melahirkan respon beragam di banyak wilayah. Banyak studi hanya fokus pada respon pemerintah di level nasional dan global dalam menghadapi pandemi, sedangkan penanganan di level lokal sangat jarang dilirik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata kelola di level lokal Desa Pujon Kidul dalam merespon pandemi COVID-19. Desa Pujon Kidul yang terletak di Kabupaten Malang merupakan salah satu desa wisata yang sukses mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan salah satu desa wisata yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan kami menjelaskan bahwa institusi lokal seperti desa memainkan peran penting dalam tata kelola penanganan pandemi. Desa berperan dalam membangun perlindungan kesehatan dan ekonomi desa dengan menekan laju penyebaran COVID-19. Setidaknya terdapat tiga aspek penting yang menjelaskan peran sukses tata kelola desa dalam pengelolaan pandemi, yaitu; mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas sektoral, dan perlindungan sosial-ekonomi. Aspek-aspek tersebut menegaskan sikap pemerintah desa yang sigap dan responsif terhadap pandemi. Tata kelola pandemi di level lokal ini menunjukkan penanganan pandemi lebih efektif. Selain itu, tata kelola lokal di Desa Pujon Kidul ini merepresentasikan model tata kelola yang adaptif (*adaptive governance*). Srtikel ini secara signifikan berkontribusi dalam memperluas studi *governance* terutama di masa krisis.

Kata kunci: Tata Kelola Lokal; Desa Wisata; Pandemi COVID-19; Pujon Kidul

Abstract

The explosion of COVID-19 pandemic has given rise to mixed responses in many regions. Many studies only focus on the government's response at the national and global levels in dealing with the pandemic, while handling it at the local level is rarely considered. This article aims to explain how governance at the local level of Pujon Kidul Village responds to the COVID-19 pandemic. Pujon Kidul Village, located in Malang Regency, is one of the tourist villages that has succeeded in realizing the welfare of rural communities and is one of the tourist villages most affected by the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative method with a case study approach. Our findings explain that local institutions such as villages play an essential role in the governance of pandemic management. Villages play a role in building health protection and the village economy by suppressing the spread of COVID-19. At least three crucial aspects explain village governance's successful role in pandemic management: resource mobilization, cross-sectoral coordination, and socio-economic protection. These aspects confirm the attitude of the village government to be alert and responsive to the pandemic. This pandemic governance at the local level shows an effective result. In addition, local governance in Pujon Kidul Village represents an adaptive governance model. This article significantly contributes to expanding the study of governance, especially in times of crisis.

Keywords: Local Governance; Tourist Village; COVID-19 Pandemic; Pujon Kidul

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



PENDAHULUAN

Ledakan virus COVID-19 telah menjadi tantangan besar yang tidak terprediksi bagi banyak institusi pemerintahan dari level lokal hingga global. Banyak sektor kehidupan manusia baik ekonomi, sosial dan kesehatan mengalami krisis akibat ledakan pandemi (Gandasari & Dwidienawati, 2020; Haleem, Javaid, & Vaishya, 2020; Suryahadi, Izzati, & Suryadarma, 2020). Di tengah kondisi krisis tersebut, masyarakat berharap banyak terhadap negara sebagai aktor utama untuk mengendalikan laju penyebaran virus COVID-19. Negara dituntut bisa bekerja cepat dan efektif untuk meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh virus COVID-19. Di sisi lain, terdapat respon beragam dari setiap institusi untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Alhasil, terdapat sejumlah negara atau institusi pemerintahan yang berhasil dan sebagian lainnya gagal mengendalikan penyebaran virus. Faktor *governance* dianggap memainkan peran besar dalam penanganan pandemi. Namun demikian, banyak studi hanya melihat penanganan pandemi COVID-19 dalam konteks global maupun nasional (Gaskell & Stoker, 2020; Shaw, Kim, & Hua, 2020), sementara konteks lokal masih jarang distudi. Untuk itu, studi ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman mengenai peran tata kelola lokal dalam konteks penanganan pandemi.

Sejumlah studi menyimpulkan bahwa tata kelola lokal (*local governance*) memainkan peran penting dalam merespon kondisi darurat akibat COVID-19 (Dutta & Fischer, 2021; Espia, Gera, & Hall, 2021; Fridayani & Soong, 2021; Gupta et al., 2021; Isaac & Sadanandan, 2020; Lian, 2021). Menurut Dutta dan Fischer (2021), terdapat tiga alasan mengapa institusi lokal berperan penting dalam penanganan pandemi COVID-19, yaitu; *Pertama*, pemerintah lokal lebih dekat terkoneksi dengan masyarakat dan lebih bisa menavigasi kondisi-kondisi lokal yang spesifik; *Kedua*, pemerintah lokal

berakar kuat dalam masyarakat dan melayani serta mungkin lebih responsif terhadap kebutuhan publik yang mendesak; *Ketiga*, pemerintah lokal sering dibayangkan lebih absah dari pada aktor eksternal lainnya dalam menjalankan peran pengaturan (*governance*). Studi ini lebih fokus pada memperdalam peran institusi lokal dengan menghadirkan konteks yang berbeda, yakni konteks lokal Indonesia. Dalam konteks pandemi COVID-19, relasi dekat institusi lokal dengan masyarakat dianggap cara paling efektif menangani penyebaran virus COVID-19. Dengan demikian, studi ini bertujuan memahami sejauhmana peran institusi lokal dalam menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19.

Studi ini dilakukan di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Desa tersebut memiliki status sebagai desa wisata mandiri sejak tahun 2019 dengan pendapatan asli desa yang tinggi. Desa tersebut juga dianggap berhasil dalam mendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Saat ini, terdapat 8 unit bisnis yang dijalankan oleh BUM Desa, yaitu, Unit Kafe Sawah, Unit Air Bersih, Laku Pandai, *Live In*, Parkir, Pertanian, PTSP, Paving dan Batako, dan Toko Desa. Keberhasilan dalam membangun sejumlah unit bisnis desa melalui Badan Usaha Miliki Desa telah mentransformasi perkembangan desa secara signifikan. Meskipun pandemi COVID-19 telah berdampak pada perkembangan ekonominya, desa merespon kemunculan virus COVID-19 dengan sejumlah upaya antisipatif sehingga pandemi tersebut tidak berdampak secara luas terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan sosial desa yang telah berjalan baik. Studi kami menemukan bahwa Desa Pujon Kidul mampu menjalankan upaya penanganan terhadap penyebaran virus COVID-19 dengan baik dan mempertahankan perkembangan ekonomi desa. Kesuksesan Desa Pujon Kidul tersebut karena tata kelola (*governance*) pandemi yang baik. Dengan kata lain, desa

mampu memainkan fungsi negara dengan baik di level lokal.

Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah terjadi sejak awal tahun 2020 dan hingga saat ini belum terkendali dengan baik. Setidaknya hingga draft ini ditulis, pemerintah pusat hingga pemerintah desa telah membuat berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Meski dalam sejumlah kasus, pemerintah dianggap cukup berhasil meminimalisir, banyak kasus yang masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Selama setahun penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia telah lebih dari 1 juta kasus yang terkonfirmasi, dengan sekitar 10% berada di Jawa Timur yang tercatat hingga pada 22 Februari 2021 (SatgasCOVID-19, 2021). Di level desa, kasus tersebut telah menunjukkan tren yang meningkat sehingga menempatkan desa dalam posisi yang rentan. Data per 28 Juni 2021, terdapat 257.335 kasus di desa dan sebanyak 10.483 orang meninggal dunia (Novri, 2021). Dalam kondisi darurat tersebut, desa dan kampung dianggap institusi lokal efektif dalam melakukan upaya pembatasan penyebaran COVID-19 di skala mikro.

Terdapat sejumlah fakta bahwa institusi lokal seperti desa sukses meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Meskipun pandemi telah menempatkan desa dalam kondisi yang rentan (Gupta et al., 2021), desa juga menjadi salah satu ujung tombak bagi usaha memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Upaya pembatasan dan pengendalian penyebaran COVID-19 tersebut dianggap dapat berjalan dengan sukses ketika pemerintah desa bisa membangun sistem tata kelola (*governance*) yang baik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di Indonesia, tata kelola penanganan COVID-19 terlihat dari sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakannya adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun 2020 dan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam skala mikro di sepanjang tahun 2021 dan 2022. Peran lokal semakin kuat ketika PPKM berlaku. Desa dan kelurahan menjadi tumpuan utama dalam pengendalian virus COVID-19. Salah satu asumsi yang diterbangkan adalah bahwa desa merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memungkinkan pembatasan dan pengendalian virus COVID-19 dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, sejak berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan dan dukungan alokasi dana desa yang besar sehingga memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan usaha pengendalian COVID-19. Dalam hal ini, desa-desa di Indonesia termasuk Pujon Kidul dituntut untuk bisa secara inovatif melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahkan telah mengeluarkan kerangka kebijakan bagi desa untuk membuat inovasi di level desa demi pengendalian COVID-19 baik melalui realokasi dana desa maupun kebijakan pembatasan lainnya. Untuk itu, pembatasan di level desa menuntut adanya kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Singkanya, kehadiran sistem tata kelola yang baik sangatlah penting untuk mengendalikan virus COVID-19 dan memperkuat ketangguhan desa di tengah krisis.

Governance Sebuah Perspektif

Konsep *governance* secara fundamental merupakan konsep penataan pemerintahan yang berkembang di era modern. Konsep ini lahir sebagai kritik terhadap kondisi pemerintahan yang tidak berjalan efektif dan dominasi kekuasaan negara yang terlalu kuat dalam pelayanan publik (Pierre & Peters, 2021). Konsep *governance* merepresentasikan perubahan

peran pemerintah yang mulai melibatkan aktor lain untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Jika paradigma pemerintahan (*government*) fokus pada seperangkat institusi, perspektif *governance* secara berbeda menjelaskan proses dimana kebijakan publik berkembang sebagai aspek paling sentral dalam pengaturan (*governing*). Kehadiran *governance* berdampak pada perubahan relasi negara dan masyarakat dan kehadiran pihak ketiga dalam pelayanan publik (Pierre & Peters, 2020).

Secara garis besar, tata kelola memiliki penggunaan teoritis dan empiris yang abstrak (Bevir, 2012). Sebagai konsep teoritis yang abstrak, *governance* mengacu pada semua proses organisasi sosial dan koordinasi sosial. Penggunaan empiris yang lebih konkret dari *governance* mengacu pada perubahan praktik organisasi di dalam perusahaan, sektor publik, dan tatanan global. Dalam perkembangannya, terdapat dua tren besar dalam diskusi *governance* (Bevir & Krupicka, 2011), yakni; pertama, *governance* sebagai konsep teoritikal yang fokus pada ilmu politik, yang dipelopori oleh Guy Peters. Secara spesifik, *governance* diarahkan untuk memahami peran negara dalam hal *steering* dan *rowing* dalam menyediakan arah kebijakan dan pelayanan publik. Peters menempatkan institusi, struktur, dan mekanisme sebagai inti dari *governance*. Kedua, *governance* sebagai praktik kultural (*cultural practice*) yang dipelopori oleh Mark Bevir. *Governance* dalam hal ini fokus kepada aktivitas-aktivitas aktor yang perlu diinterpretasikan dalam proses *governance*. Bevir menekankan interpretasi dan pemahaman historis untuk menjelaskan *governance*. Artikel ini lebih kepada definisi *governance* yang dijelaskan oleh Peters.

Dalam hal kebijakan, konsep *governance* tidak hanya menjadi fokus pada bagaimana kebijakan bisa dilaksanakan secara efektif, tapi juga bagaimana keputusan kolektif dapat dibuat. Chhotray dan Stoker mendefinisikan *governance*

(tata kelola) sebagai aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas aktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan syarat hubungan antara aktor dan organisasi ini (Chhotray & Stoker, 2009). Teori tata kelola membantu membongkar pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses pengambilan keputusan kolektif gagal atau berhasil dalam masyarakat. Selain itu, tata kelola menanyakan bagaimana tugas-tugas ini dapat dilakukan dengan efektif dan sah. Dengan kata lain, tata kelola berusaha memahami cara membangun pengambilan keputusan kolektif. Selain itu, *governance* juga merujuk kepada kapasitas negara untuk menjalankan kebijakan (Matthews, 2012).

Dalam studi ini, perspektif *governance* dimaksudkan untuk memahami kerjasama dan koordinasi antar aktor baik secara horizontal maupun vertikal dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, perspektif ini untuk memahami kapasitas institusi lokal dalam penanganan pandemi di level lokal. Di masa krisis seperti Pandemi COVID-19, keterlibatan berbagai aktor merupakan salah satu kunci untuk mempercepat penanganan pandemi dan meminimalisir dampak resiko yang ditimbulkan. Meskipun COVID-19 telah melahirkan krisis tata kelola (Mas'udi & Winanti, 2020b), banyak studi yang telah menegaskan pentingnya faktor *governance* sebagai kunci dalam pengendalian dan penanganan virus COVID-19 (Haryanto, 2021; Peters, 2021; Sharma, Borah, & Moses, 2021). Pada akhirnya *governance* merupakan kunci untuk memperkuat kapasitas negara di level lokal, terutama dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Temuan kami menjelaskan bahwa faktor *governance* telah berkontribusi dalam keberhasilan penanganan penyebaran COVID-19 di level desa. Beberapa aspek penting dari tata

kelola tersebut adalah mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas sektoral, dan perlindungan sosial-ekonomi.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Metode ini dipilih karena fokus studi ini adalah berusaha mengungkap makna, perkembangan, struktur, perilaku, dan hubungan, dalam rangka memahami tata kelola desa, dimana dibutuhkan penggalian-penggalian informasi yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Desa ini merupakan salah satu desa wisata paling berkembang di Provinsi Jawa Timur. Melalui BUMDES Sumber Sejahtera, Pemerintah Desa Pujon Kidul mendorong perkembangan ekonomi desa. Terdapat banyak unit usaha yang telah dikelola oleh BUMDES diantaranya adalah Cafe Sawah. Unit-unit usaha ini telah berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) secara signifikan. Pada tahun 2018, kontribusi BUMDes bagi PADes mencapai 800 juta dan terus naik hingga 1,4 miliar di tahun 2019 dan 2020. Tentunya, keberadaan BUMDes telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Ketika Pandemi COVID-19 menyebar, unit-unit bisnis desa ini mengalami penurunan akibat adanya pembatasan. Namun demikian, unit bisnis tersebut berhasil bertahan dan bangkit kembali.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yakni wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, pengamatan dan wawancara adalah dua metode yang sering digunakan untuk memahami realitas objek penelitian, terutama menggali informasi mengenai cara pemerintah desa dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu para informan yang terhubung langsung dengan tata kelola desa dan Satgas COVID-19 sehingga memiliki

informasi yang banyak dan akurat tentang sistem pengelolaan penanganan pandemi COVID-19 di desa. Diantaranya adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Satgas COVID-19, dan masyarakat. Data hasil wawancara dengan informan kunci diolah dan dijadikan sebagai dasar penyusunan sub tema dalam artikel ini. Selain itu, data-data wawancara yang dikumpulkan dikonfirmasi di tingkat pemerintah desa dan pemerintah daerah (triangulasi data). Pengumpulan data juga dilakukan dengan menginventarisasi data dari berbagai kebijakan pemerintah, laporan, dan arsip surat kabar tentang kebijakan desa dalam merespon pandemi COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Pandemi Di Desa Pujon Kidul

Mobilisasi Sumber Daya Lokal

Penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas hingga ke level desa, telah mendorong pemerintah desa untuk mengambil tindakan pencegahan dan penanganan. Ketika pemerintah pusat membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan memberlakukan sejumlah kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah desa juga ikut membentuk Satgas COVID-19. Di Desa Pujon Kidul, Satgas dan LINMAS Wisata menjadi aktor utama dalam penanganan COVID-19 di level desa. Semua langkah penanganan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dijalankan oleh kedua aktor tersebut di level desa. Langkah tersebut dilakukan secara koordinatif lintas institusi atau aktor. Sejumlah langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui Satgas dan LIMNAS Wisata dalam pencegahan dan penanganan pandemi adalah dengan menggerakkan berbagai sumber daya desa, baik fisik, materil dan non fisik/materil. Upaya tersebut tidak hanya menasar individu, pelaku usaha desa, tapi juga wisatawan yang berkunjung ke desa.

Secara garis besar, upaya mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh desa menyoar pada dua aspek, yaitu kesehatan dan sosial-ekonomi. Kedua aspek ini merupakan aspek yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Di bidang kesehatan, Satgas melakukan sejumlah kampanye dan himbauan untuk taat terhadap protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan sejumlah kelengkapan seperti APD (Alat Pelindung Diri), masker, disinfektan, vitamin, penyediaan fasilitas kesehatan, pendirian posko dan rumah isolasi. Sedangkan di bidang sosial-

ekonomi, pemerintah pusat, daerah, dan desa menyalurkan sejumlah bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT), pendampingan terhadap bisnis desa, menjalankan program yang banyak berfokus pada Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sehingga ekonomi desa dapat berkembang dan kemiskinan dapat ditekan. Dalam berbagai upaya tersebut dalam penanganan kesehatan dan pemulihan sosial-ekonomi, sejumlah aktivitas di level daerah dan desa yang terhubung satu sama lain adalah seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Beragam aktivitas Pemerintah Daerah dalam merespon pandemi COVID-19

No.	Aktivitas	Tujuan
1.	Menyiapkan regulasi turunan mengena penanganan COVID-19 di level daerah	Memberikan kepastian hukum, landasan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19
2.	Himbauan	Memberikan informasi dan edukasi melalui menyebarkan spanduk, flayer dan berbagai kanal media sosial yang berisi ajakan untuk menaati protokol kesehatan, langkah-langkah pencegahan, mengenali gejala kesehatan, dan langkah hidup sehat.
3.	Memastikan pelaksanaan pembatasan sosial (PSBB dan PPKM)	Membatasi mobilitas masyarakat baik antar kota, dan dalam kota untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
4.	Memastikan ketersediaan Fasilitas kesehatan dan tenaga kerja kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
5.	Mendorong Program Kampung Tangguh dan Desa Tangguh	Memperkuat daya tahan desa dalam merespon penyebaran virus COVID-19
6.	Disinfektan dan sanitasi diberbagai fasilitas publik	Perlindungan kesehatan dan upaya pencegahan.
7.	Melakukan superivis terhadap desa-desa wisata	Memastikan pelaksanaan kebijakan dan ketaatan masyarakat desa terhadap protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah
8.	Monitoring situasi kesehatan	Evaluasi perkembangan COVID-19
9.	Distribusi masker dan sanitizer	Langkah antisipasi dan perlindungan kesehatan masyarakat

Selain itu, dalam merepson panyebaran virus COVID-19, Desa Pujon Kidul melakukan berbagai langkah seperti pengalokasian dana desa untuk COVID-19, penyediaan fasilitas kesehatan, penyemprotan disinfektan yang dapat memperbaiki kondisi kesehatan, dan perlindungan sosial ekonomi masyarakat

desa. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terkoordinasi dengan aktivitas yang dilakukan di level desa. Dalam hal ini, pemerintah desa memanfaatkan dan memobilisasi berbagai sumber daya yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga terintegasi dengan upaya yang dilakukan

oleh desa. Berikut adalah beragam aktivitas desa dalam penanganan pandemi COVID-19 (Tabel 2).

Sebagai desa Wisata, Desa Pujon Kidul melakukan kampanye, himbauan kepada masyarakat melalui pengeras suara keliling desa dan pemasangan berbagai himbauan di sejumlah lokasi di desa. Targetnya, tidak hanya masyarakat desa, tapi juga para pengunjung yang akan datang ke Desa Pujon Kidul. Kampanye dan

himbauan ini dianggap sebagai salah satu langkah efektif untuk menyebarkan informasi secara cepat kepada masyarakat mengenai bahaya dan langkah pencegahannya virus COVID-19. Di Desa Pujon Kidul, langkah ini dilakukan tidak hanya menyebarkan himbauan, tapi juga penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan wisata. Seperti wastafel, cuci tangan dan handsanitizer.

Tabel 2. Beragam aktivitas Pemerintah Desa dalam penanganan pandemi COVID-19

No.	Aktivitas	Tujuan
1.	Sosialisasi keliling kampung	Membangun Kesadaran masyarakat akan kesehatan dan bahasa virus COVID-19
2.	Melakukan penyempornan disinfektan pada fasilitas publik dan lingkungan	Upaya Pencegahan Penyebaran
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Mempermudah masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan
4.	Pemberian vitamin bagi relawan	Meningkatkan kekebalan tubuh
5.	Pemeriksaan kesehatan bagi Tenaga Kerja Indonesia	Mencegah penuluran dan penyebaran dari masyarakat yang pulang dari luar negeri
6.	Mendirikan posko	Sebagai pusat koordinasi kegiatan
7.	Menyediakan Ruang Isolasi Desa	Untuk mengisolasi masyarakat desa atau pengunjung yang teridentifikasi gejala COVID-19
8.	Membentuk Gugus COVID-19	Sebagai <i>Task Force</i> yang bergerak dan bertanggung jawab terhadap kondisi dan perkembangan COVID-19 di level desa.
9.	Himbauan	Hal ini dilakukan dengan menyebarkan spanduk, flayer yang berisi ajakan untuk menaati protokol kesehatan, langkah-langkah pencegahan, mengenali gejala kesehatan, dan langkah hidup sehat.
10.	Membuat SOP Penanganan COVID-19 dan Normal Baru	Menyiapkan regulasi/kebijakan kelembagaan sebagai landasan pelaksanaan penanganan COVID-19.

Jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kesamaan, misalnya Desa Gubukklakah, salah satu desa wisata yang lokasinya juga di Kabupaten Malang. Pada dasarnya pemerintah daerah melakukan skema tatanan hidup baru atau *New Normal Life* terhadap pola perilaku pasca pandemic covid 19. Sehingga terdapat beberapa aturan yang wajib dilakukan pada desa wisata jika ingin Kembali dibuka yakni adanya bukti yang cukup kuat bahwa

persebaran COVID-19 diwilayah tersebut sudah bisa dikontrol. Memiliki kapasitas kesehatan cukup untuk tes COVID-19 (antigen), ruang isolasi, tracing dan karantina pasien jika terkonfirmasi positif, kelompok populasi beresiko harus dilindungi khususnya orang berusia lansia dan individu dengan penyakit komorbid, Penggunaan masker, jaga jarak dan menerapkan protocol kesehatan, serta adanya komunitas yang turut aktif dalam melawan penyebaran

COVID-19. Untuk melancarkan syarat tersebut pemerintah Kabupaten Malang sudah menyiapkan salah satu langkah yaitu membentuk Kampung Tangguh di 378 Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. Pemkab juga sudah menerbitkan buku pedoman pengoperasian kampung Tangguh..

Desa Gubugklakah dan Pujon Kidul sebagai desa wisata sama-sama memiliki berbagai aturan agar bisa membuka Kembali sektor pariwisata di wilayah masing-masing. Di Desa Gubugklakah pengunjung wajib memenuhi protokol kesehatan salah satunya menggunakan masker sedangkan pengelola menyediakan tempat cuci tangan dan alat *thermo gun* serta adanya pemberian jarak yang ditandai dengan tanda silang. Selain itu, pemerintah Kabupaten Malang mewacanakan untuk pembelian tiket online untuk tempat wisata.

Pujon Kidul termasuk ketat karena kerjasama antar warga dan masyarakat bisa sejalan sehingga dilakukan penutupan area secara ketat, dilakukan patrol cipta kondisi PPKM Darurat yang dilaksanakan setiap hari. Sedangkan di Desa Gubugklakah melakukan operasi yustisi yang dilakukan sepanjang jalan Desa gubugklakah menuju Desa Ngadas dan menyisir café-café yang berada di sepanjang jalan tersebut. Penyisiran tersebut untuk menertibkan pemakaian masker dan hansitizer dikalangan masyarakat. Namun hanya dilakukan beberapa waktu tertentu saja.

Koordinasi Intens lintas institusi

1) Multi aktor dan Institusi

Ledakan pandemi COVID-19 yang tidak terprediksi dan berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, telah mendorong terbentuknya kolaborasi yang intens antara institusi baik vertikal maupun horizontal. Di awal pandemi, pemerintah pusat memberikan respon dengan membentuk Satgas (Satuan Tugas) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang didirikan pada 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden No. 7

Tahun 2020 yang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Respon tersebut diikuti dengan pembentukan Satgas di level daerah dan desa. Sejak 1 Juni 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melalui Keputusan Bupati Malang No.188.45/380/KEP/35.07.013/2020

tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Malang. Pada tanggal 20 Juli 2020, Satuan Tugas tersebut dibubarkan dan digantikan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sepanjang tahun 2020, dan di sepanjang tahun 2021 mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat). Kedua kebijakan tersebut merupakan kebijakan utama pemerintah pusat yang berlaku di seluruh Indonesia termasuk desa.

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo juga bahkan menginstruksikan agar kementerian fokus mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi di berbagai sektor; sosial, ekonomi, dan kesehatan. Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini menjadi lembaga negara yang terdepan dalam penanganan pandemi tersebut. Di level desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga membuat berbagai himbauan, kampanye, dan pedoman bagi desa penanganan COVID-19. Desa bahkan didorong untuk memprioritaskan dana desa untuk penanganan pandemi. Begitu pula Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memberikan supervisi kepada desa-desa wisata sehingga desa dapat memiliki kekuatan ekonomi.

Meski hubungan antar lembaga yang sempat buruk di awal pandemi, tapi dalam

kurun hampir dua tahun masa pandemi, koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun horizontal cenderung semakin membaik. Hal ini terlihat dari efektivitas penanganan penyebaran virus dan menurunnya jumlah kasus COVID-19. Di level lokal, koordinasi antara institusi atau aktor berlangsung cukup intens, meskipun koordinasi tersebut cenderung tersentral, dimana pemerintah pusat memiliki peran yang dominan. Sistem pemerintahan

Indonesia yang desentralis semestinya memberikan peran besar lokal dalam penanganan penyebaran pandemi COVID-19. Namun demikian, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur kesehatan antara wilayah serta kondisi darurat yang sulit terkendali, memberikan pengecualian terhadap pemerintah pusat untuk mengambil langkah penanganan. Berikut adalah sejumlah aktor yang terlibat dalam penanganan pandemi di level lokal (Tabel 3)

Tabel 3. Aktor-Aktor dalam Penanganan Pandemi COVID-19

No.	Aktor	Peran
1.	Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah	Koordinator, mengarahkan, penanggungjawab, pemantauan, evaluasi dan merumuskan kebijakan strategis berdasarkan tingkat kewenangan
2.	Kemendes	Memberikan himbauan, monitoring, perlindungan ekonomi dan kesehatan terhadap desa dan desa wisata (Desa Tangguh COVID-19).
3.	Kemenkraf	Supervisi Desa untuk memenuhi standar kelayakan dan kemananan untuk pembukaan wisata di masa pandemi. Desa Pujon Kidul mendapatkan sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan, Sertifikat <i>Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability</i> (CHSE).
4.	Rumah Sakit	Melakukan sosialisasi dan koodinasi dengan relawan COVID-19 desa.
5.	Pemerintahan Kecamatan	Membantu koordinasi dan sosialisasi penanganan
6.	TNI/POLRI (Jajaran Kodim dan Polresta, Babinsa dan Bhabinkamtibmas)	Bersama Pemkab melakukan langkah pengamanan hingga level RT/RT
7.	Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terlibat dalam edukasi dan persiapan pembukaan wisata desa di masa pandemi
8.	Masyarakat desa	Sosialisasi, melaporkan, menaati protokol kesehatan
9.	Swasta (MBLC)	Melaporkan, Sosialisasi Protokol kesehatan
10.	BPBD	Menentukan status kedaruratan dan mengkoordinasikan kesiapsiagaan
11.	Satgas COVID-19	Pelaksana umum penanganan COVID-19
12.	Media Lokal dan Nasional	Kampanye dan pemberitaan penanganan COVID-19

Keterlibatan banyak aktor dalam hal penanganan pandemi COVID-19 diikuti dengan diterbitkannya sejumlah kebijakan dari level pusat hingga level desa. Sebagian daerah bahkan membuat inisiatif untuk melakukan langkah penanganan seperti Kampung Tangguh di Jawa Timur dan Jogo

Tonggoh di Jawa Tengah. Meskipun demikian, banyak kebijakan pemerintah mengenai penanganan pandemi justru menegaskan sentralitas pemerintahan. Atas alasan kedaruratan, berbagai bentuk penanganan pandemi terkesan sentralis. Secara garis besar, keterlibatan banyak

aktor ini telah menunjukkan bentuk koordinasi yang instens antar aktor atau lembaga baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berikut adalah sejumlah

kebijakan pandemi yang menegaskan relasi antara institusi pemerintahan dari level pusat hingga desa (Tabel 4).

Tabel 4. Kebijakan Pandemi COVID-19

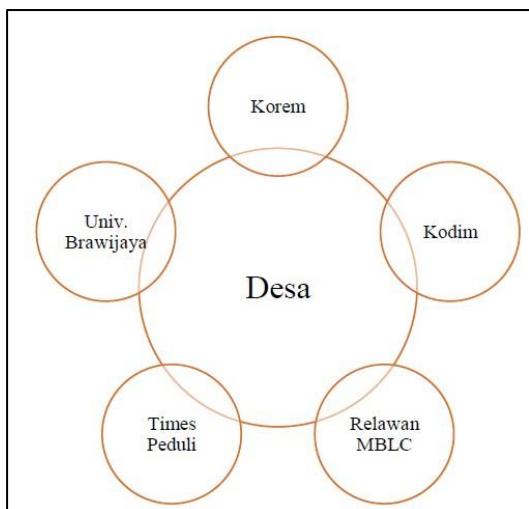
No.	Kebijakan	Aktor
1.	Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19)	Presiden
2.	Surat Edaran No 8 tahun 2020 Tentang Desa Tangguh COVID-19 dan Penegasan PKTD	Kemendes
3.	<u>Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)</u> Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Malang	Pemda Kabupaten Malang
4.	<u>Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)</u> Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/Kpts/013/2021 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/34/Kpts/013/2021 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019	Pemprov Jatim
5.	Keputusan Kepada Desa Pujon Kidul No 01 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020	Pemdes Pujon Kidul

2) Kolaborasi Lintas Lokal: Memperkuat Ketahanan Lokal

Program Kampung Tangguh yang ada di Malang Raya merupakan wujud dari kolaborasi antara aktor atau institusi dalam merespon pandemi COVID-19 di level lokal. Kampung Tangguh merupakan inisiasi lokal yang dimotori oleh sejumlah lembaga lokal dan masyarakat untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Malang Raya. Program ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten dan provinsi lain. Alhasil, program Kampung Tangguh ini telah menjadi alternatif lokal yang menggerakkan sumber daya lokal dalam merepon pandemi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat kampung-kampung atau desa diberikan pelatihan dan pemahaman mengenai penanganan pandemi dan kesiapan mereka ketika resiko tak terduga muncul. Masyarakat dalam program ini diarahkan menjadi penggerak utama kampung ketika

ada bencana. Jika program penanganan lain lebih bersifat instuksional dan institusional, maka Kampung Tangguh lebih mengedepankan sikap solidaritas, kekeluargaan, dan gotong-royong masyarakat lokal untuk membantu sama lain dengan memanfaatkan sumber daya lokalnya secara optimal.

Dengan demikian, Kampung Tangguh pada dasarnya merupakan benteng terdepan bagi masyarakat kampung untuk terhindar dari bahaya virus COVID-19. Program Tangguh Kampung melibatkan banyak aktor baik dari pihak masyarakat, LSM, TNI/POLRI, Perguruan Tinggi, dan Media. Mereka bersinergi bahu membahu dalam mensukseskan program Kampung Tangguh ini. Bahkan, Program ini mendapatkan dukungan yang luar dari masyarakat kampung dan desa. Berikut adalah aktor-aktor yang terlibat dalam Program Kampung Tangguh seperti terlihat pada Gambar 1.



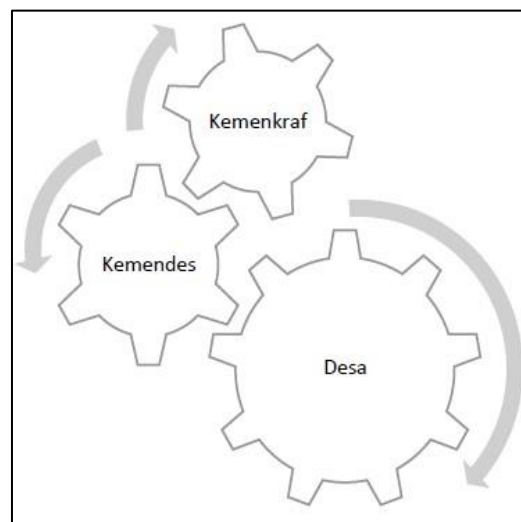
Gambar 1. Kolaborasi Kampung Tangguh di Kabupaten Malang

3) Kolaborasi Lokal-Nasional: Upaya Membangun Kepercayaan dan Ekonomi

Di tengah ketidakpastian dan rasa khawatir masyarakat terhadap virus COVID-19, pemerintah desa Pujon Kidul melakukan sejumlah langkah untuk membangun kepercayaan terhadap publik dan ketangguhan desa. Hal ini dimaksudkan untuk menggait minat para calon wisatawan yang akan berkunjung ke lokasi wisata. Dengan membangun kepercayaan dan ketangguhan desa terhadap COVID-19, pengunjung dapat yakin bahwa desa wisata yang mereka kunjungi aman dari virus COVID-19. Sejumlah pencapaian yang dilakukan oleh Desa Pujon Kidul untuk membangun kepercayaan tersebut adalah sebagai berikut;

Pertama, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Desa Pujon Kidul mendapatkan supervisi untuk memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kelayakan bagi opsi pembukaan wisata di masa pandemi. Hal tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan dan asesmen terhadap persiapan pembukaan wisata yang meliputi manajemen pengelola wisata dan ketersediaan SOP (Standar Operasional Prosedur). Secara spesifik, sejumlah hal

yang menjadi penilaian adalah ketersediaan infrastruktur kesehatan, ketersediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kesehatan, ketersediaan peralatan keamanan dan keselamatan, manajemen kunjungan dan mengikut protokol kesehatan. Setelah dilakukan serangkaian penilaian, Desa Pujon Kidul mendapatkan sertifikat *Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) yang merupakan jaminan kepada wisatawan akan kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian wisata sehingga pengunjung mendapatkan jaminan dan perlindungan. Upaya penguatan desa ini melibatkan sejumlah aktor berikut (Gambar 2).



Gambar 2. Aktor penguatan Desa

Kedua, melalui program Kampung Tangguh, Desa Pujon Kidul mendapat juara satu sebagai Kampung Tangguh COVID-19. Hal ini menunjukkan kesiapan dari pengelola wisata untuk membuka kunjungan wisata ke desa mereka. Kampung Tangguh sendiri merupakan inisiasi lokal untuk mendukung penanganan penyebaran virus COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah dan sebagai benteng kuat masyarakat di level lokal. *Ketiga*, pemerintah menerapkan strategi buku-tutup wisata. Hal ini untuk

menghindari dampak penyebaran virus COVID-19 yang diakibatkan adanya mobilitas masyarakat atau kunjungan wisatawan. Sebagai desa wisata, pendatang atau pengunjung yang masuk ke desa menjadi pertimbangan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan. Hal ini karena potensi penyebaran COVID-19 lebih besar datang dari para pendatang dari pada masyarakat desa. Oleh karena itu, penutupan wisata menjadi salah satu upaya penanganan pandemi. Buku-tutup menjadi salah satu strategi agar ekonomi desa tidak terpuruk terlalu jauh sehingga berdampak pada kemiskinan masyarakat desa.

Peran Tata Kelola Dan Resiliensi Lokal

Tata kelola (*governance*) memainkan peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19 di level lokal. Seperti pada Desa Pujon Kidul ini mendemonstrasikan peran penting institusi lokal dalam menjalankan fungsi negara. Di masa darurat seperti pandemi, tata kelola lokal telah membentuk pola baru. Hal ini ditunjukkan dengan model koordinasi antar lintas institusi baik secara vertikal maupun horizontal yang lebih dinamis dan intens. Kolaborasi menjadi kunci dalam penanganan virus yang tidak terkendali. Selain itu, studi ini juga menegaskan peran sentral institusi lokal dalam merespon kondisi darurat yang terjadi di tengah masyarakat, yang berperan dalam memobilisasi berbagai sumber daya dan mengimplementasikan berbagai kebijakan pusat dengan baik untuk penanganan pandemi. Meskipun, pemerintahan pusat mengambil peran besar dalam berbagai pengambilan kebijakan, dalam hal implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan dengan baik di level lokal. Hal ini menunjukkan kemampuan institusi lokal dalam penanganan pandemi. Selain itu, tata kelola pandemi di level lokal ini mengindikasikan adanya perubahan relasi antara negara dan masyarakat dimana peran institusi lokal semakin kuat dan menjalankan fungsi negara dengan baik. Hal

ini terlihat dari responsifitas dan efektivitas penanganan pandemi di level lokal.

Dalam konteks tata kelola pandemi di Desa Pujon Kidul, secara umum, pemerintah desa memiliki dua tujuan utama, yakni perlindungan kesehatan dan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah dengan melakukan berbagai upaya seperti memobilisasi berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk menangani pandemi di level desa, melakukan koordinasi lintas institusi, dan memberikan perlindungan sosial dan ekonomi sehingga masyarakat tetap sehat dan wisata desa bisa bangkit. Secara spesifik, pelaksanaan protokol kesehatan, vaksinasi, pemberian vitamin, penyediaan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan himbauan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan, sedangkan pada aspek ekonomi, sebagai desa wisata, pemerintah desa membangun kepercayaan publik terhadap para pengunjung wisata, menyalurkan sejumlah bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT), pendampingan terhadap bisnis desa, dan menjalankan program yang berfokus pada Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pada titik ini, kesehatan dan ekonomi desa adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan untuk melindungi masyarakat desa dari virus dan disisi lain memulihkan ekonomi desa dengan mendorong pertumbuhan unit bisnis yang dimiliki oleh Desa Pujon Kidul.

Krisis seperti pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman (Mas'udi & Winanti, 2020a), tapi juga telah memicu lahirnya bentuk baru tata kelola. Sejumlah studi menjelaskan bahwa pandemi telah mendorong adanya tata kelola yang adaptif, meskipun hal tersebut mensyaratkan tingkat toleransi yang tinggi antara aspek-aspek yang tampak paradoks seperti mekanisme sentralisasi dan desentralisasi, inovasi dan birokrasi, dan politik dan sains (Janssen & van der Voort, 2020). Selain itu, konteks Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjalankan sistem pemerintahan desentralis menghadirkan konteks baru

dimana tata kelola lokal dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti masalah kewenangan, kapasitas pemerintah, dan kepercayaan publik. Konteks tata kelola Pujon Kidul tidak jauh berbeda dengan institusi lokal di negara-negara Asia Timur seperti India dan Nepal yang memiliki kapasitas dalam tata kelola sehingga sukses dalam penanganan pandemi (Dutta & Fischer, 2021; Gupta et al., 2021). Institusi lokal seperti yang berada di Kerala, India justru menunjukkan adanya faktor histori dari tata kelolanya sehingga dapat membangun tata kelola yang baik. Meskipun sama-sama menunjukkan peran tata kelola institusi lokal seperti Kerala, tata kelola lokal yang kuat di Desa Pujon tidak hanya dukung oleh kelembagaan (UU Desa dan Desentralisasi), tapi juga inisiasi lokal yang merepresentasikan kemampuan lokal dalam melakukan adaptasi dan kolaborasi dalam penanganan pandemi.

Kehadiran UU Desa dan Kebijakan Desentralisasi telah berkontribusi memperkuat institusi lokal. Melalui UU Desa, kewenangan desa semakin besar sehingga kebijakan strategis dapat buat secara cepat berdasarkan inisiasi lokal maupun mengikuti kebijakan dari institusi suprastruktur, begitu pula dengan desentralisasi yang memungkinkan pemerintah daerah dan desa dapat berkoordinasi dengan mudah dan cepat sehingga mempermudah penanganan di level lokal. Menurut Gaskell dan Stoker, sistem pemerintahan desentralis memungkinkan terjadinya respon cepat dan implementasi kebijakan di masa darurat seperti pandemi COVID-19 (Gaskell & Stoker, 2020). Kekuasaan yang terdesentralisasi memungkinkan terjadinya tata kelola yang lebih efektif dan ada kapasitas institusi lokal, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Apalagi, desa telah menjadi institusi otonom sehingga memungkinkan penanganan darurat di masa datang dapat lebih responsif. Selain itu, kolaborasi antar aktor

menjadi kunci dalam penanganan kondisi darurat.

SIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini telah menjelaskan bahwa tata kelola lokal memainkan peran penting dalam penanganan pandemic COVID-19. Tata kelola lokal yang dijalankan oleh Desa Pujon Kidul dalam penanganan pandemi mendemonstrasikan bentuk baru pada sebuah tata kelola desa. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 telah menjadi pemicu yang mentransformasi adanya perubahan model tata kelola baru dan peran institusi lokal seperti desa. Di Pujon Kidul, pemerintah desa tidak hanya mampu membangun kolaborasi dan memobilisasi sumber daya, dan perlindungan sosial-ekonomi, tapi juga bisa membangun kepercayaan publik untuk memulihkan statusnya sebagai desa wisata yang tangguh. Upaya pemerintah desa Pujon Kidul dalam tata kelola menasar pada dua aspek, yaitu kesehatan dan sosial-ekonomi. Pada tahapan ini, pemerintah desa secara sigap merespon ledakan pandemi dengan membangun tata kelola desa yang lebih responsif dan adaptif sehingga terbentuk resiliensi kesehatan dan ekonomi lokal, dan di sisi lain laju penyebaran COVID-19 di level lokal juga dapat ditekan dan dikendalikan. Hal ini menegaskan peran sentral institusi lokal dalam penanganan pandemi. Kesuksesan Desa Pujon Kidul dalam tata kelola pandemi tersebut, setidaknya menjelaskan tiga hal penting, yakni; peran penting institusi lokal yang menjalankan fungsi negara di level lokal, tata kelola lokal yang memungkinkan penanganan secara efektif, pentingnya kolaborasi antar aktor/institusi dalam situasi krisis, dan adanya perubahan relasi antara negara dan masyarakat yang diakibatkan peran institusi lokal yang semakin kuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini didanai penuh oleh Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya melalui

skema Hibah Penelitian Pemula (HPP) Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Bevir, M. (2012). *Governance: A very short introduction*. Oxford: OUP Oxford.
- Bevir, M., & Krupicka, B. (2011). On two types of governance theory. A response to B. Guy Peters. *Critical Policy Studies*, 5(4), 450–453. <https://doi.org/10.1080/19460171.2011.628069>
- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). *Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach*. New York: Springer.
- Dutta, A., & Fischer, H. W. (2021). The local governance of COVID-19: Disease prevention and social security in rural India. *World Development*, 138, 105–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105234>
- Espia, J. C., Gera, W., & Hall, R. A. (2021). Local Adaptations to Central Government Shortcomings: COVID-19 Responses in the Cities of Iloilo and Cebu, Philippines. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 43(1), 53–62.
- Fridayani, H. D., & Soong, J. J. (2021). The Emergent Role of Local Government On COVID-19 Outbreak In Indonesia: A New State-Society Perspective. *Journal of Governance*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31506/jog.v6i1.10287>
- Gandasari, D., & Dwidienawati, D. (2020). Content analysis of social and economic issues in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Heliyon*, 6(11), e05599.
- Gaskell, J., & Stoker, G. (2020). Centralized or Decentralized: Which Governance Systems are Having a “Good” Pandemic? *Democratic Theory*, 7(2), 33–40.
- Gupta, D., Fischer, H., Shrestha, S., Ali, S. S., Chhatre, A., Devkota, K., ... Rana, P. (2021). Dark and bright spots in the shadow of the pandemic: Rural livelihoods, social vulnerability, and local governance in India and Nepal. *World Development*, 141, 105370.
- Isaac, T. M. T., & Sadanandan, R. (2020). COVID-19, Public health system and local governance in Kerala. *Economic & Political Weekly*, 55(21), 35.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55, 102180.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020b). Covid 19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 3–18). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Matthews, F. (2012). Governance and state capacity. In D. Levi-Faur (Ed.), *The Oxford handbook of governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Novri. (2021). Per 28 Juni, Jumlah Kasus Positif COVID-19 Di Desa 257.335 Orang. Retrieved from <https://kemendes.go.id/berita/view/detail/3801/per-28-juni-jumlah-kasus-positif-covid-19-di-desa-257335-orang>
- Peters, B. G. (2021). Governing in a time of global crises: the good, the bad, and the merely normal. *Global Public Policy and Governance*, 1(1), 4–19. <https://doi.org/10.1007/s43508-021-00006-x>
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2021). *Advanced Introduction to Governance*. UK: Edward Elgar Publishing.
- Pujon-opd. (2020). Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Retrieved January 3, 2022, from <http://pujon.malangkab.go.id/pd/detail>

?title=Pujon-penyaluran-bantuan-sosial-tunai-bst

SatgasCOVID-19. (2021). Peta Sebaran COVID-19. Retrieved from <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>

Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. Poverty & Inequality Indonesia*. Retrieved from <https://smeru.or.id/en/content/impact-COVID-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>